

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi 1998 memberikan dampak dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan otonomi daerah. Yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas ekonomi dan tugas berbantuan. Reformasi birokrasi dinilai penting antara lain karena keberhasilan suatu kebijakan ditentukan pula oleh kemampuan manajemen dalam birokrasi pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien dan efektif. Seluruh aktivitas dalam lingkungan pemerintahan akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik kinerja individu kinerja unit kerja, kinerja instansi dan kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/rencana yang akan atau telah dicapai, dimana kegiatan/rencana tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran dan memiliki kuantitas serta kualitas yang terukur. Kinerja adalah kondisi yang harus dipahami dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk menentukan tingkat pencapaian hasil organisasi, terkait dengan visi yang diterapkan oleh organisasi, dan untuk memahami dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional yang dianut. Dalam hal ini, berdasarkan informasi kinerja instansi pemerintah, akan dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, seperti

koreksi kebijakan, membenahan kegiatan pokok dan tugas instansi, untuk menentukan tingkatan keberhasilan instansi pemerintah.

Penilaian kinerja instansi pemerintah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena pada dasarnya, kinerja instansi pemerintah berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan. Untuk membangun instansi pemerintah yang berhasil, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga akuntabilitas harus dilakukan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien.

Kinerja instansi dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya (Wiguna, 2016). Dengan aplikasi teknologi informasi, maka suatu organisasi akan mengalami perubahan sistem manajemen dari sistem tradisional ke sistem manajemen kontemporer. Teknologi informasi berkaitan dengan pelayanan, hal tersebut dikarenakan salah satu indikator dari kualitas pelayanan adalah kecepatan pelayanan. Kecepatan pelayanan didukung oleh kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah adalah perencanaan penyusunan anggaran. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran ini dimaksudkan agar pemerintah mengetahui sebatas mana kemampuan yang dimiliki pemerintah dalam melaksanakan tugasnya agar selaras dengan tujuan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Menurut

Tamasoleng (2015), anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi. Perencanaan anggaran merupakan tahapan penting karena besarnya anggaran yang diperlukan untuk semua rencana/kegiatan dirumuskan dalam suatu perencanaan, sehingga realisasi/keberhasilan anggaran kegiatan dimulai dari perencanaannya. Perencanaan anggaran yang baik, haruslah mencakup seluruh kegiatan yang ada pada suatu instansi, sehingga program suatu instansi yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan lancar.

Kedua variabel tersebut sudah pernah diuji pengaruhnya terhadap kinerja instansi pemerintah oleh peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Anis (2014) memberikan kesimpulan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, penelitian oleh Haslinda (2016) memberikan kesimpulan perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi pemerintah daerah. Kemudian, penelitian oleh Damayanti (2017) memberikan kesimpulan pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Penelitian oleh Amri (2019) memberikan kesimpulan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini dilakukan untuk menggabungkan dan menguji kembali variabel independen (pemanfaatan teknologi informasi dan perencanaan penyusunan anggaran) yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu terhadap kinerja instansi pemerintah. Pada penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang menggabungkan kedua variabel independen yang peneliti gunakan untuk

menguji pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang.

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik(<https://magelangkota.bps.go.id>)

Pada tahun 2020 terdapat kendala pada pencapaian kinerja BPS Kota Magelang yaitu belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi yang ada pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan. Selain itu, penulis juga menemukan kurangnya pemahaman pegawai BPS Kota Magelang tentang akuntabilitas kinerja, serta adanya keterbatasan anggaran terutama pada anggaran pengadaan barang dan jasa terkait ruangan Pelayanan Statistik Terpadu (PST).

Pada tahun 2021, kondisi baik nasional maupun internasional masih dilanda pandemi wabah Covid-19. Situasi ini sangat mempengaruhi pola kerja, pelaksanaan lapangan dan penyerapan anggaran serta pencapaian kinerja yang ditetapkan instansi. Sebagaimana tahun sebelumnya, sistem kerja masih dilakukan dengan sistem WFH (*Work From Home*)/WFO (*Work From Office*) secara bergiliran dengan penerapan protokol kesehatan (prokes), pembatasan/penghapusan pelatihan tatap muka, pembatasan pelaksanaan lapangan dengan wawancara langsung ke responden, serta dukungan anggaran yang dikurangi untuk penghematan penanganan *Covid-19*

secara nasional sangat mempengaruhi penyelesaian target kinerja di lapangan. Penggantian metode pelatihan dengan sistem online, berpengaruh terhadap tingkat penerimaan dan pemahaman petugas terhadap materi, konsep definisi dan SOP yang cenderung menurun. Demikian juga dalam pelaksanaan lapangan dengan sistem online, baik melalui telepon langsung, email, WA dan lain-lain juga sangat tergantung dari kesadaran masyarakat (responden). Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan.

Kendala-kendala yang dihadapi selama tahun 2020 sampai dengan 2021 menyebabkan pencapaian kinerja BPS Kota Magelang kurang maksimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat judul penelitian “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Perencanaan Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pusat Statistik Kota Magelang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

- 1) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah Badan Pusat Statistik Kota Magelang?
- 2) Apakah perencanaan penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah Badan Pusat Statistik Kota Magelang?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak menyimpang terlalu jauh, maka ada beberapa hal yang perlu dibatasi oleh peneliti, diantaranya :

- 1) Penelitian dilakukan pada Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
- 2) Penulis hanya meneliti bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi

informasi dan perencanaan penyusunan anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah Badan Pusat Statistik Kota Magelang.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan perencanaan penyusunan anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah pada Badan Pusat Statistik Kota Magelang.

1.5 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu mengenai masalah pemanfaatan teknologi informasi dan perencanaan penyusunan anggaran dalam pengaruhnya terhadap kinerja instansi pemerintah Badan Pusat Statistik Kota Magelang.

2) Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi instansi pemerintah BPS Kota Magelang dalam mengontrol dan memperhatikan pemanfaatan teknologi informasi, akuntabilitas kinerja dan perencanaan penyusunan anggaran dalam pengaruhnya terhadap kinerja instansi pemerintah Badan Pusat Statistik Kota Magelang.